

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi. 2014. *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulonprogo*. EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vo. 1 No. 1 Juni 2010, 31-42. ISSN: 2503-2968
- Asmaul Aziz. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)*. E-Journal STIE Dewantara. EKSIS: Vol XI No 1, 2016 ISSN: 1907-7513
- Burhanuddin Abdullah. 2011. *Menanti Kemakmuran Negeri*. Jakarta: Gramedia.
- Carunia Mulya Firdausy. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Cetakan kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan. Diakses dari: www.djpk.kemenkeu.go.id.
- DJPk. 2017. *RUU Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Diakses dari: www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Doni Silalahi, Rachmad Sitepu dan Gim Tarigan. 2014. *Analisis Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dengan Metode Regresi Data Panel*. Sainia Matematika Vol. 2 No. 03 pp. 237-251. ISSN 2337-9197.
- Ernawati dan Jaeni. 2018. *Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017)*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Mei 2018, Hal: 73 - 81 Vol. 7, No. 1 ISSN : 2656-4955 (media online): 2656-8500 (media cetak).
- Gita Maiyora. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. *Jom Fekon* Vo. 2 No. 2, Oktober 2015 ISSN:2355-6853

- Halkadri Fitra. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV IRDH.
- Im Nur Aminah dan Nunuy Nur Afiah. 2019. *Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, hal 147-165 p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876
- Indah Puspa Sari. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jom Fekon Volume 3, Nomor 1, Februari 2016. ISSN 2355-6854
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Juli Panglima Saragih, 2011. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Raja Grafindo
- KBBI, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Tersedia: <http://kbbi.web.id/kemakmuran> [Diakses 29 Februari 2020]
- Kiswanto dan Dian Fatmawati. *Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya*. Jurnal Kajian Akuntansi Volume 3, Nomor 1. ISSN 2579-9991
- Kusumawardani. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal Volume 1 Nomor 1. ISSN 2252-6765
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad Mahsun. 2019. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2019. *Profil Jawa Barat*. Diakses dari: <https://jabarprov.go.id/infografis>. [25 Februari 2020]
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryane. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Putu Riestry dan Ni Made. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 1150-1182 ISSN: 2302-8556
- Rina Novia dan Kartim. 2019. *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua*. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua* : Volume 1 Nomor 1 Desember 2019. ISSN: 2686-2069
- Rudy badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM. Yogyakarta
- Setiawan dan Dwi Endah Kusri. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: ANDI.
- Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo. 2017. *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan*. KOMPARTEMEN Volume 15 Nomor 1. Maret 2017
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukwiyaty, Sudirman Jamal, Slamet Sukanto. 2011. *Ekonomi SMA Kelas X*. Jakarta: Yudhistira.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Tempo.co. 2017. *Kemenkeu Tuding Pemda Boros, Jawa Barat*. [Online]. Tersedia: <https://bisnis.tempo.co/read/1036186/kemenkeu-tuding-pemda-boros-jawa-barat-kami-sudah-efisien>. [22 Februari 2020]
- Tumpal Manik. 2013. *Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia* Volume 4, Nomor 2, Desember 2013. ISSN 2615-6334

Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Teori, Konsep, Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wahyuddin dan Nora Sugianal. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Volume 5, Nomor 1, Februari 2017. ISSN : 2301-4717 P. 51-60

Yoshino, Naoyuki dan Peter J. Morgan. 2017. *Central and Local Government Relations in Asia*. Cheltenham: Edwar Elgar Publishing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.